

## ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PDRB PER KAPITA DI LAMPUNG TAHUN 2015-2021

Rima Nova Kurnia Pramono<sup>1</sup> Ukhti Ciptawaty<sup>2</sup> Heru Wahyudi<sup>3</sup> Dedy Yulianawan<sup>4</sup>

### Article history:

Submitted: 20 Februari 2024

Revised: 27 Februari 2024

Accepted: 28 Februari 2024

### Keywords:

Fiscal decentralization;

GRDP Per Capita;

Fixed Effect Model;

PAD, DAK, DAU, and DBH;

### Kata Kunci:

Desentralisasi Fiskal;

PDRB Per Kapita;

Fixed Effect Model;

PAD, DAK, DAU, dan DBH;

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Lampung,

Lampung, Indonesia

Email:

[rimanovakurnia235@gmail.com](mailto:rimanovakurnia235@gmail.com)

m

### Abstract

Fiscal decentralization is a strategy of the policies by the government to strengthen the financial relationship between the center and the regions, with the aim of improving the welfare of the people in a region. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization proxied by PAD, DAK, DAU, and DBH on GRDP Per Capita. The data in this study are secondary data using the panel data analysis method with the 2015-2021 time period sourced from the Central Bureau of Statistics and the Directorate General of Fiscal Balance, using the Fixed Effect Model approach. The results of the analysis show that partially PAD, DAK, and DAU have a positive and significant effect on GRDP per capita. Meanwhile, DBH has a positive and insignificant effect on GRDP per capita. The purpose of this study is to determine the impact of the implementation of fiscal decentralization on GRDP per capita of 15 regencies/cities in Lampung in 2015-2021.

### Abstrak

Desentralisasi fiskal ialah strategi kebijakan oleh pemerintah untuk memperkuat hubungan keuangan antara pusat dan daerah, dengan tujuan menaikkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal yang diproksikan dengan PAD, DAK, DAU, dan DBH terhadap PDRB Per Kapita. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan metode analisis data panel dengan periode waktu 2015-2021 bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan memakai metode pendekatan *Fixed Effect Model*. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial PAD, DAK, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Sedangkan, DBH berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari implementasi desentralisasi fiskal terhadap PDRB Per Kapita 15 Kabupaten/Kota di Lampung pada tahun 2015-2021.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia<sup>2</sup>

Email: [ukhti.ciptawaty@feb.unila.ac.id](mailto:ukhti.ciptawaty@feb.unila.ac.id)<sup>2</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia<sup>3</sup>

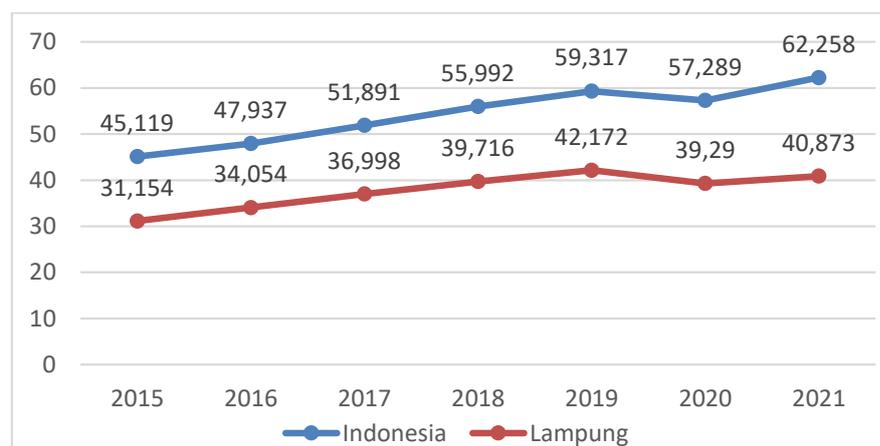
Email: [heru.wahyudi@feb.unila.ac.id](mailto:heru.wahyudi@feb.unila.ac.id)<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Lampung, Indonesia<sup>4</sup>

Email: [dedy.yulianawan@feb.unila.ac.id](mailto:dedy.yulianawan@feb.unila.ac.id)<sup>4</sup>

## PENDAHULUAN

Kuznets seperti yang dikutip dalam Sukirno (1995) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan suatu negara untuk terus meningkatkan produksi dan penyediaan barang serta jasa dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa Total output keuangan dari semua entitas ekonomi yang beroperasi di suatu wilayah tertentu disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk mengukur PDRB, dapat digunakan harga konstan atau harga berlaku. PDRB Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahunnya, seperti yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung. Hal ini menunjukkan bagaimana kebiasaan pembelian para pelaku ekonomi dapat mempengaruhi perekonomian daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

**Gambar 1. PDRB Perkapita Indonesia dan Lampung 2015-2021**

Tingkat kehidupan penduduk dalam suatu negara atau daerah berkorelasi positif dengan PDRB per kapita. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per individu. Di samping itu, ketersediaan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan belanja masyarakat juga dipengaruhi secara signifikan oleh kondisi pasar regional (Affandi et al., 2021). Gambar 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2021, PDRB per kapita Provinsi Lampung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, PDRB per kapita Provinsi Lampung tetap berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2021, PDRB per kapita Lampung mencapai 40.873, sementara rata-rata nasional mencapai 62.258. Salah satu cara untuk menilai kemajuan suatu daerah adalah dengan melihat pendapatan per kapitanya. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa pendapatan per kapita Lampung masih di bawah angka nasional. Jika pendapatan per kapita suatu daerah rendah, dapat disimpulkan bahwa struktur sosial dan ekonominya sedang mengalami penurunan (Jamaludin & Juliansyah, 2020).

Dengan penerapan otonomi daerah, Pemerintah Indonesia mengubah struktur kerja pemerintahannya dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pemerintah pusat mengalihkan sejumlah kekuasaan dan sumber daya kepada pemerintah daerah, termasuk desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, memberi mereka wewenang untuk merancang kebijakan yang bertujuan meningkatkan pendapatan. Memutuskan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing adalah salah satu kekuatan tambahan yang dimiliki pemerintah daerah (Aulia, 2014). Menurut Hastuti (2018) Desentralisasi fiskal memiliki tujuan untuk mengurangi disparitas antar daerah, menjamin standar minimum pelayanan publik di seluruh wilayah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan nasional sesuai kebutuhan mereka, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan

akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan daerah.

Sebuah kerangka teoritis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip fiskal federalis dapat dipergunakan untuk menggambarkan dampak ekonomi dari desentralisasi fiskal. Dalam konteks memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan daerah, konsep federalisme fiskal menjelaskan keterkaitan antara desentralisasi dan ekonomi lokal. Desentralisasi memfasilitasi pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di suatu daerah. Pandangan ini menjelaskan bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah pusat secara alamiah dibatasi karena pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan membuat regulasi yang berhubungan dengan aspek ekonomi lokal mereka (Tiebout, 1956). Tujuan dari Teori Federalisme Fiskal adalah untuk mengedukasi masyarakat sehingga mereka memahami konsekuensi dari kebijakan desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintah terhadap ekonomi, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat (Samudra & Handayani, 2020).

Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) Pendapatan Daerah Lain yang Sah. Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Seiring berjalannya waktu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari: (1) PAD; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Pendapatan Daerah Lain yang Sah. Pendapatan transfer mencakup transfer dari Pemerintah Pusat dan transfer antardaerah. Transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari: (1) Dana Perimbangan; (2) Dana Otonomi Khusus; (3) Dana Keistimewaan; dan (4) Dana Desa. Sementara itu, transfer antardaerah mencakup: (1) Pendapatan Bagi Hasil; dan (2) Bantuan Keuangan (Puspita & Hamidi, 2021).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan resmi yang berasal dari sumber-sumber pendapatan utama daerah, seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pajak daerah, dan sumber-sumber lainnya. Pemerintah daerah mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan BUMD, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Salah satu tujuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang berasal dari pemerintah federal. Pendapatan utama daerah (PAD) dapat ditingkatkan dengan adanya infrastruktur dan peralatan yang diperlukan (Cahyaning, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup dan efisien juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk investasi dalam sektor-sektor yang memperbaiki produktivitas dan daya saing wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan cenderung meningkatkan PDRB per kapita karena membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Al-Khawarizmi, (2021) Pada penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jawa Timur menyimpulkan bahwa Hasil uji secara simultan mengindikasikan seluruh variabel Penapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap PDRB Jawa Timur sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap Produk Domestik Bruto PDRB di Provinsi Jawa Timur. Namun, dalam studi yang dilakukan oleh Mafahir & Soelistiyo (2017) mengenai dampak PAD, DAU, dan DAK terhadap PDRB di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB, sementara DAU dan DAK memiliki dampak positif terhadap PDRB.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan kegiatan

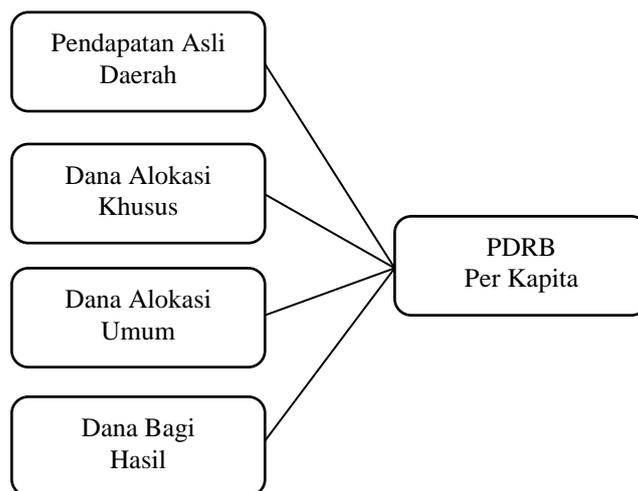
husus yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah setiap daerah tertentu. Alokasi dana DAK sejalan dengan agenda nasional secara menyeluruh (Azizi, 2018). Dana alokasi khusus dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat fisik dan nonfisik. Konsep keagenan merujuk pada kapasitas individu atau kelompok untuk bertindak dan membuat keputusan secara independen. DAK atau Dana Transfer dengan Karakteristik Hibah yang Sesuai Klasifikasi, menetapkan bahwa pemerintah daerah harus memberikan kontribusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan usaha, program, atau kegiatan di bidang tertentu (Puspita et al., 2021). DAK sering dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur dengan tujuan meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan efisiensi di suatu wilayah. Investasi tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, irigasi, serta proyek-proyek energi dan transportasi. Dengan meningkatnya investasi infrastruktur, diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing wilayah tersebut. Dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran, alokasi DAK dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan yang akhirnya dapat berkontribusi pada pertumbuhan PDRB per kapita. Dalam studi yang dilakukan oleh Mokorowu et al. (2020) mengenai dampak pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara, disimpulkan bahwa PAD, DBH, DAU, dan DAK memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa Tenggara jika dianalisis secara parsial. Penelitian lain oleh Rahmah & Zein (2016) yang meneliti pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh, menyimpulkan bahwa PAD, DAU, dan DBH memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber daya keuangan yang luas yang diberikan kepada berbagai kabupaten dan kota untuk menangani ketidaksetaraan dalam kapasitas dan kebutuhan keuangan mereka. Penetapan alokasi dana ini didasarkan pada formula yang mengikuti standar khusus, dan cenderung memberikan lebih banyak dana kepada daerah-daerah yang tertinggal dan berpendapatan rendah daripada daerah yang lebih makmur (Alvaro & Prasetyo, 2020). DAU yang efisien dan sesuai sasaran memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal. Dengan menyediakan insentif keuangan dan program-program pengembangan ekonomi, pemerintah daerah dapat menggalakkan para pelaku ekonomi lokal untuk melakukan investasi dan mengembangkan usaha mereka. Ini berpotensi meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan per kapita. Menurut penelitian terdahulu yakni Hidayat & Santosa (2020) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum secara signifikan dan positif mempengaruhi PDRB.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah alokasi dana yang diberikan kepada daerah dengan proporsi tertentu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari pemberian dana ini adalah untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi berbagai kebutuhan di berbagai lokasi. Konsep ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, yang sering dikenal sebagai ketidakseimbangan vertikal, dapat diatasi melalui desentralisasi kewenangan fiskal, yang juga dikenal sebagai DBH (Keuangan, 2017). Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH Pajak. Dana dari DBH juga bisa digunakan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Peningkatan dalam akses dan kualitas layanan ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, yang juga berperan dalam meningkatkan PDRB per kapita. Penerimaan DBH dapat membantu memperkuat stabilitas fiskal suatu daerah dengan menyediakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Ini dapat membantu daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang tidak terduga serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada penelitian Eliza et al. (2014) hasil penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan terhadap PDRB di Aceh menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil memiliki dampak positif terhadap PDRB. Artinya, ketika alokasi dana DAU dan DBH meningkat, maka PDRB juga akan mengalami peningkatan.

Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB (hasil estimasinya tidak signifikan), yang mengindikasikan bahwa peningkatan alokasi dana DAK dapat menyebabkan penurunan tingkat PDRB.

Berdasarkan konteks, terdapat sebuah fenomena di mana desentralisasi fiskal mengalami peningkatan, tetapi PDRB per kapita di Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung mungkin belum berkembang sebagaimana yang diharapkan jika dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap PDRB Per Kapita di Lampung Tahun 2015-2021.



Sumber : diolah

**Gambar 2. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar 2 serta penelitian sebelumnya berikut adalah hipotesis yang didapat dipersembahkan :

H<sub>a1</sub> : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap PDRB Per Kapita

H<sub>a2</sub> : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap PDRB Per Kapita

H<sub>a3</sub> : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif Terhadap PDRB Per Kapita

H<sub>a4</sub> : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap PDRB Per Kapita

H<sub>a5</sub> : Desentralisasi Fiskal secara bersamaan berpengaruh signifikan Terhadap PDRB Perkapita

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah studi deskriptif dan kuantitatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Penelitian ini difokuskan pada dua kelompok faktor yang memiliki signifikansi tertentu. Variabel yang menjadi fokus penelitian adalah tingkat PDRB per kapita. Variabel independen dalam penelitian ini mencakup pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Penelitian ini difokuskan pada 15 kabupaten/kota di wilayah Lampung pada rentang tahun 2015 hingga 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Widarjono (2018) menggunakan data panel, yang merupakan kombinasi dari data time series dan data cross-section (Widarjono, 2018). Data panel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data cross-section yang mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, serta data time series dari tahun 2015 hingga 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini

mencakup sumber sekunder seperti pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan PDRB per kapita. Sumber data untuk penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan perangkat lunak Eviews 10 dan Microsoft Excel untuk melakukan perhitungan.

Dalam penelitian ini, metode kuantitatif digunakan untuk analisis, dengan Regresi Data Panel sebagai metode analisis utama. Sebelum melakukan pengujian, analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang setiap variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis statistik deskriptif menghasilkan data tentang nilai minimum, maksimum, dan rata-rata untuk setiap variabel yang digunakan, yang disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif.

Kemudian, tiga metode dipertimbangkan sebagai model terbaik: Random Effect Model, Fixed Effect Model, dan Common Effect Model. Pemilihan model terbaik dapat dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Setelah model dipilih, dilakukan uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

Setelah memastikan data memenuhi asumsi yang diperlukan, dilakukan pengujian hipotesis untuk menentukan pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji-t digunakan untuk menilai pengaruh variabel independen secara parsial, uji-f digunakan untuk menilai pengaruh variabel secara simultan, dan koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini, model regresi ditentukan oleh persamaan sebagai berikut:

$$PDRBPKP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DAU_{it} + \beta_4 DBH_{it} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman awal tentang setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukan analisis statistik deskriptif. Hasil analisis tersebut menampilkan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, dan rata-rata (mean) dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian, disajikan dalam bentuk tabel statistik deskriptif.

**Tabel 1.**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Keterangan	PDRBPKP	PAD	DAK	DAU	DBH
Mean	35.41643	120582.5	1967844.	718699.0	40772.51
Median	35.17679	76051.00	223100.0	636375.0	27378.00
Maximum	56.30431	627297.0	1.84E+08	1378175.	606759.0
Minimum	17.49308	11598.00	21339.00	363081.0	11856.00
Std. Dev.	9.786499	130210.3	17899993	270078.6	70844.16
Skewness	0.286781	2.415747	10.09960	0.677280	6.778974
Kurtosis	2.198169	8.658320	103.0045	2.317442	50.34309

Sumber: data diolah dengan Eviews 10

Hasil dari tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa, secara keseluruhan di berbagai kabupaten dan kota di Lampung, rata-rata produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita adalah sebesar 35,42 juta rupiah. Pendapatan asli daerah memiliki rata-rata sebesar 120.582,5 juta rupiah, sedangkan dana alokasi khusus memiliki rata-rata sebesar 1967844 juta rupiah. Rata-rata dana alokasi umum mencapai 718699 juta rupiah, dan rata-rata dana bagi hasil adalah 40772,51 juta rupiah.

Model penelitian ditentukan melalui penggunaan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow digunakan untuk membandingkan antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Kemudian, dilanjutkan dengan Uji Hausman yang membandingkan antara

Random Effect Model (REM) dan Fixed Effect Model (FEM). Terakhir, Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk membandingkan antara Random Effect Model (REM) dan Common Effect Model (CEM).

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-Section F	53.817636	(14,86)	0.0000
Cross-section Chi-Square	239.231573	14	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 10

Berdasarkan hasil uji Chow di atas, didapati bahwa nilai statistik chi-square adalah 239.231573, yang mengakibatkan penolakan terhadap  $H_0$  dan penerimaan  $H_a$  dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang lebih rendah dari nilai ambang signifikansi 0.05 ( $\alpha$  5%). Dari hasil uji Chow ini dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih unggul daripada *Common Effect Model*.

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-Section Random	53.817636	(14,86)	0.0000

Sumber: Data diolah Eviews 10

Dari data tabel yang disajikan, terlihat bahwa probabilitas untuk random Cross-section adalah 0.0000, yang berada di bawah tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Hasil ini mengindikasikan penolakan terhadap hipotesis nol ( $H_0$ ). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang sesuai adalah model *Fixed Effect*.

Hasil regresi menunjukkan bahwa model terbaik yang dipilih adalah model Fixed Effect, dan hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.528430	4.943235	1.927570	0.0572
PAD	7.66E-05	9.44E-06	8.113118	0.0000
DAK	3.48E-08	1.66E-08	2.101756	0.0385
DAU	2.28E-05	7.01E-06	3.248689	0.0017
DBH	5.37E-06	5.15E-06	1.043208	0.2998
R-squared	0.933263	Prob(F-statistic)		0.0000
Adjusted R-squared	0.919295	Durbin-Watson stat		0.993272

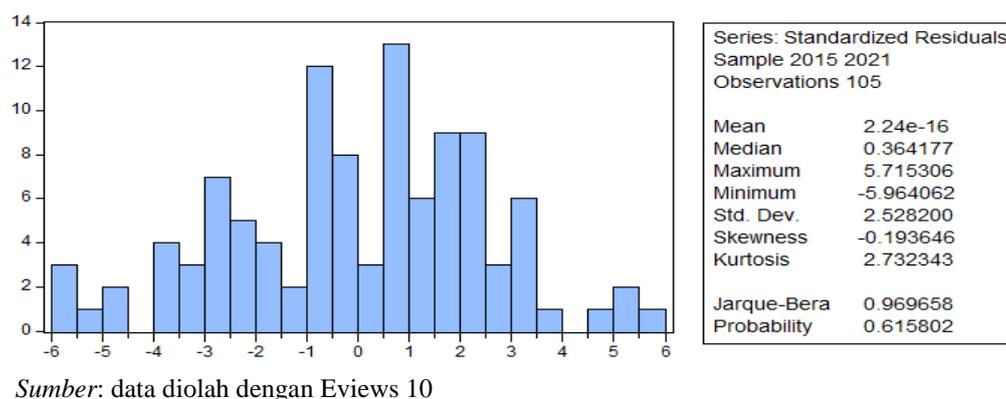
Sumber: data diolah dengan Eviews 10

$$\begin{aligned} \text{PDRBPKP}_{it} = & 9.528430 + 0.0000766\text{PAD}_{it} + 0.0000000348\text{DAK}_{it} \\ & + 0.0000228\text{DAU}_{it} + 0.00000537\text{DBH}_{it} \end{aligned}$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan yakni, nilai konstanta dalam persamaan tersebut adalah 9.528430. Ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen memiliki nilai 0 (nol), PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Per Kapita di 15 Kabupaten/Kota di Lampung adalah sekitar 9.53 juta rupiah. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0.05) dengan koefisien sebesar 0.0000766. Ini berarti bahwa jika pendapatan asli daerah meningkat satu juta rupiah, diperkirakan PDRB Per Kapita akan meningkat sekitar 76.6 ribu rupiah. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0.05) dengan koefisien sebesar 0.0000000348. Jika dana alokasi khusus meningkat satu juta rupiah,

diperkirakan PDRB Per Kapita akan meningkat sekitar 0.0348 ribu rupiah (34.8 rupiah). Dana Alokasi Umum juga memiliki pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0.05) dengan koefisien sebesar 0.0000228. Artinya, jika dana alokasi umum meningkat satu juta rupiah, diperkirakan PDRB Per Kapita akan meningkat sekitar 22.8 ribu rupiah. Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0.05) dengan koefisien sebesar 0.00000537. Jika dana bagi hasil meningkat satu juta rupiah, diperkirakan PDRB Per Kapita akan meningkat sekitar 5.37 ribu rupiah.

Untuk memastikan apakah data yang akan digunakan telah memenuhi persyaratan model regresi yang berkualitas, maka dilakukan uji asumsi klasik. Terdapat empat bentuk uji asumsi klasik yaitu autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas. Hasil dari uji asumsi klasik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:



**Gambar 3. Uji Normalitas**

Dari hasil Uji Normalitas menggunakan metode Jarque-Bera, didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.615802, yang lebih besar daripada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  (0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

**Tabel 5.**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Prob.	Kesimpulan
PAD	0.9775	Ho diterima
DAK	0.1491	Ho diterima
DAU	0.2436	Ho diterima
DBH	0.6104	Ho diterima

Sumber: data diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan Tabel 5. terlihat bahwa probabilitas semua variabel bebas lebih tinggi dari nilai  $\alpha = 0,05$ . Dengan menerima hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menolak hipotesis alternatif ( $H_a$ ), dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 6.**  
**Uji Multikolinearitas**

	PAD	DAK	DAU	DBH
PAD	1.000000	-0.009413	0.553618	0.449950
DAK	-0.009413	1.000000	-0.043933	-0.027914
DAU	0.553618	-0.043933	1.000000	0.270169
DBH	0.449950	-0.027914	0.270169	1.000000

Sumber: data diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan Tabel 6. tidak terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen dengan nilai lebih dari 0.80. Dengan menerima hipotesis nol ( $H_0$ ) dan menolak hipotesis alternatif ( $H_a$ ), dapat disimpulkan bahwa dalam data penelitian tidak terdapat masalah multikolinearitas.

**Tabel 7.**  
**Uji Durbin Watson**

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
tak ada autokorelasi, baik positif atau negatif	Terima	$d_U < d < 4 - d_U$

Sumber : Gujarati & Porter (2013)

Berdasarkan hasil estimasi, nilai statistik Durbin-Watson yang diperoleh adalah 0.993272 untuk semua variabel. Selain itu, rentang nilai untuk batas bawah ( $d_L$ ) adalah 0.685 dan batas atas ( $d_U$ ) adalah 1.977, seperti yang tercantum dalam Tabel 7. Dengan nilai Durbin-Watson berada di antara  $d_L$  dan  $d_U$ , hal ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif yang signifikan dalam model. Dengan demikian, tidak ada pola atau ketergantungan positif yang signifikan dalam kesalahan model, dan asumsi dasar tentang independensi kesalahan terpenuhi.

Tabel 4. tidak hanya menampilkan hasil dari model terbaik, yaitu model *Fixed Effect*, tetapi juga menggambarkan hasil dari pengujian hipotesis secara parsial. Berikut ialah hasil analisis secara parsial:

**Tabel 8.**  
**Uji-t Parsial**

Variabel Statistic	t-Statistic	t-Tabel	Prob.	Keterangan
PAD	8.113118	1.660234	0.0000	Ho ditolak
DAK	2.101756	1.660234	0.0385	Ho ditolak
DAU	3.248689	1.660234	0.0017	Ho ditolak
DBH	1.043208	1.660234	0.2998	Ho diterima

Sumber: data diolah dengan Eviews 10

Berdasarkan tabel 8. di atas, tiga variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum menolak hipotesis nol ( $H_0$ ). Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel tersebut, yakni PAD, DAK, dan DAU, secara signifikan memengaruhi PDRB Per Kapita di 15 Lampung secara statistik. Sementara itu, uji signifikansi pada variabel dana bagi hasil menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima. Hal ini menggambarkan bahwa secara statistik, variabel dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Per Kapita di Lampung.

**Tabel 9.**  
**Uji-F Simultan**

<b>F-Statistic</b>	<b>F-Tabel</b>	<b>Prob.</b>	<b>Keterangan</b>
66.81315	2.462615	0.0000	Ho ditolak

*Sumber:* data diolah dengan Eviews 10

Nilai F-statistik sebesar 66,81315 dan nilai F-tabel sebesar 2,42615 ditentukan berdasarkan Tabel 9. Karena nilai F-statistik lebih tinggi dari F-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2021, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil berpengaruh secara bersama-sama terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Per Kapita di Lampung.

Kemampuan garis regresi untuk memperhitungkan data diukur dengan koefisien determinasi ( $R^2$ ), yang mencerminkan persentase varians total dari variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai koefisien determinasi pada Tabel 4 adalah 0,919295, yang setara dengan 91,92%. Artinya, sekitar 91,92% dari variasi PDRB per kapita Lampung dapat dijelaskan oleh variasi dalam Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Meskipun demikian, terdapat sekitar 8,08% varians lain dari PDRB per kapita yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel tersebut dalam model.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita di Lampung. Sementara itu, meskipun Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap PDRB Per Kapita di Lampung.

Koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 0,0000766 menunjukkan pengaruh positif berdasarkan hasil estimasi. Berdasarkan uji signifikansi parsial, PDRB per kapita di Lampung pada periode 2015-2021 secara signifikan dipengaruhi oleh variabel PAD. Nilai t-statistik untuk variabel PAD sebesar 8,113118, melebihi nilai t-tabel sebesar 1,660234 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan satu juta rupiah pada pendapatan asli daerah akan mengakibatkan kenaikan sebesar 76,6 ribu rupiah pada PDRB per kapita. Meskipun kontribusinya terbatas, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan PDRB per kapita. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik, Pendapatan Asli Daerah di Lampung mengalami peningkatan dari 2,84 triliun pada tahun 2020 menjadi 3,25 triliun pada tahun 2021. Ini sejalan dengan PDRB per kapita Provinsi Lampung yang meningkat dari 40,87 juta pada tahun 2020 menjadi 45,12 juta pada tahun 2021. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat berkontribusi pada peningkatan PDRB per kapita. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Al-Khawarizmi (2021) dan Nuryasman (2011) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak positif terhadap PDRB Per Kapita. Namun, hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Mafahir & Soelistiyo (2017) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB.

Koefisien regresi variabel DAK menunjukkan nilai positif sebesar 0.0000000348, sebagaimana yang telah diestimasi. Berdasarkan uji signifikansi parsial, PDRB per kapita Lampung dalam rentang tahun 2015-2021 dipengaruhi secara signifikan oleh variabel DAK. Nilai t-statistik variabel DAK mencapai 2,101756, melebihi nilai t-tabel sebesar 1,660234 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ , yang mengindikasikan hal ini. Artinya, setiap peningkatan satu juta rupiah pada Dana Alokasi Khusus akan menyebabkan kenaikan PDRB per kapita sebesar 0,0348 ribu rupiah atau setara dengan 34,8 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kontribusinya terbilang kecil, Dana Alokasi Khusus memiliki potensi untuk meningkatkan PDRB per kapita. Hasil pengujian ini sesuai dengan penelitian Mokorowu et al. (2020) dan Salsabillah (2018) bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap PDRB Per

Kapita. Sedangkan pada penelitian Suranto (2023) bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Koefisien regresi untuk variabel DAU menunjukkan nilai positif sebesar 0,0000228 berdasarkan hasil estimasi. Dari hasil uji signifikansi parsial, dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita Lampung dalam rentang tahun 2015-2021 dipengaruhi secara signifikan oleh variabel DAU. Hal ini dibuktikan oleh nilai t-statistik variabel DAU yang mencapai 3,248689, melebihi nilai t-tabel sebesar 1,660234 pada tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$ . Dengan demikian, tiap kenaikan satu juta rupiah pada dana alokasi umum akan menghasilkan kenaikan sebesar 22,8 ribu rupiah pada PDRB per kapita. Meskipun kontribusinya relatif kecil, dana alokasi umum dapat memberikan kontribusi pada peningkatan PDRB per kapita. Hal ini terjadi karena nilai DAU (Dana Alokasi Umum) yang besar, serta pengelolaan belanja daerah yang dominan dibandingkan dengan nilai total DAU itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kali pemerintah daerah menerima DAU, dana tersebut cenderung dialokasikan untuk membiayai berbagai kebutuhan belanja pemerintah daerah, termasuk belanja modal. Penelitian ini selaras dengan penelitian Rahmah & Zein (2016) dan Wulantari & Haviz (2021) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap PDRB. Sedangkan pada penelitian Rarung (2016) memiliki perbedaan dimana Dana Alokasi Umum (DAU) tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB.

Dengan merujuk pada hasil estimasi, koefisien regresi untuk variabel DBH menunjukkan tanda positif sebesar 0.00000537. Berdasarkan uji signifikansi parsial, dapat disimpulkan bahwa PDRB per kapita Lampung dalam periode 2015-2021 dipengaruhi secara positif dan marginal oleh variabel DBH. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik variabel DBH sebesar 1.043208, yang melebihi tingkat signifikansi  $\alpha = 0.05$  namun lebih rendah dari nilai t-tabel sebesar 1.660234 dengan probabilitas 0.2998. Hasil ini menunjukkan bahwa kenaikan dana bagi hasil sebesar satu juta rupiah akan menghasilkan kenaikan produk domestik bruto per kapita sebesar 22,8 ribu rupiah. Namun demikian, hal ini mengindikasikan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah belum memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan tingkat PDRB Per Kapita. Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil di Lampung mengalami penurunan sebesar 135.366 juta rupiah pada tahun 2021, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2020 mencapai 157.793 juta rupiah. Namun, tren ini tidak sesuai dengan PDRB Per Kapita di Provinsi Lampung, yang meningkat dari 40,87 juta pada tahun 2020 menjadi 45,12 juta pada tahun 2021. Dapat disimpulkan bahwa ukuran Dana Bagi Hasil (DBH) tidak secara konsisten berkorelasi atau tidak selalu memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tetapi lebih tergantung pada potensi sumber daya dan penerimaan pajak yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sebagai contoh, dalam periode 2017 hingga 2018, Provinsi Lampung mengalami kasus korupsi terkait pembayaran pajak air tanah oleh PT Great Giant Pineapple (GGP) yang melibatkan pejabat Lampung Tengah (Sukarta & Damiri, 2021). Pejabat dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan juga terlibat dalam kasus korupsi pajak mineral dan batubara antara tahun 2017 hingga 2019, seperti yang dilaporkan oleh Wildan (2021). Praktik korupsi dan penyalahgunaan dana bagi hasil dapat berdampak merugikan terhadap pembangunan ekonomi dan infrastruktur di daerah. Kasus-kasus korupsi tersebut dapat menjadi faktor penyebab ketidakberhasilan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Penelitian ini selaras dengan Ridwan & Anis (2021) yang mengemukakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, pada penelitian Eliza et al. (2014) menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan pada penelitian Monica & Sa'roni (2022) memiliki perbedaan yakni Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap PDRB.

## SIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada pengujian dan analisis data yang sudah dilaksanakan, mendapatkan kesimpulan yakni bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Per Kapita. Dimana PAD, DAK, dan DAU mampu meningkatkan PDRB Per Kapita. Sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB Per Kapita, dimana dana bagi hasil mampu meningkatkan PDRB namun tidak secara konsisten berkorelasi atau tidak selalu memberikan dampak langsung pada PDRB Per Kapita. Pada uji koefisien secara simultan menunjukkan bahwa variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDRB Per Kapita 15 Kabupaten/Kota di Lampung pada tahun 2015-2021.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah Lampung. Penyebabnya melibatkan penyimpangan atau penyelewengan dalam penggunaan pendapatan pemerintah. Untuk mengatasi tantangan ini, disarankan agar pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung menekankan transparansi dalam pengelolaan dan pengawasan dana otonomi. Selain itu, keterlibatan pemerintah pusat dalam memantau dan mengevaluasi mekanisme program serta penggunaan Dana Bagi Hasil di Lampung juga diperlukan. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dianggap memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan efisiensi pengawasan alokasi belanja daerah. Pemerintah berkeinginan untuk memperoleh hasil yang optimal dari lembaga-lembaga daerahnya. Dalam konteks desentralisasi, langkah-langkah ini dianggap sebagai langkah untuk mencegah atau menghentikan penyalahgunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur guna merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

## REFERENSI

- Affandi, Hamzah, A., & Risma, O. R. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1994-2020. *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen*, 5(1), 49–56. <https://doi.org/10.35308/jbkan.v5i1.3233>
- Al-Khawarizmi, M. A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Provinsi Jawa Timur. *OIKOS Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 5, 107–112. <https://doi.org/10.23969/oikos.v5i2.3394>
- Alvaro, R., & Prasetyo, A. (2020). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Provinsi di Indonesia. *Jurnal Budget*, 5(2), 103–120.
- Aulia, N. (2014). *HUBUNGAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT KEMISKINAN, DAN KESENJANGAN PENDAPATAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012*. 3(2), 327–336.
- Azizi, M. (2018). Dampak Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2005 – 2014. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset Dan Inovasi)*, 2(1), 1–32.
- Cahyaning, S. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DBH terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai Variabel Moderating pada pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi jawa timur tahun 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1), 1–39.
- Eliza, Z., Muhammad, S., & Nasir, M. (2014). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan PDRB di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(1), 44–54.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 1(1), 784–799.
- Hidayat, W. S., & Santosa, B. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pdrb Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat 2010 – 2015. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 5(1), 25–30. <https://doi.org/10.25105/pdk.v5i1.6421>
- Jamaludin, & Juliansyah, H. (2020). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pendapatan Perkapita Indonesia.

- Jurnal Ekonomika Indonesia*, 9(2), 1. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v9i2.3178>
- Keuangan, D. J. P. (2017). *Dana Bagi Hasil*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5726>
- Mafahir, A., & Soelistiyo, A. (2017). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Pdrb Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, 143–152.
- MN, N. (2011). Peranan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (Pdrb) Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi*, XVII(Vol 17, No 2 (2012): July 2012), 237–255.
- Mokorowu, L. A., Rotinsulu, D. C., & Engka, D. S. M. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Bagi Hasil (Dbh, Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(04), 81–94.
- Monica, F., & Sa'roni, C. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019). *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 819. <https://doi.org/10.20527/jiep.v5i2.7031>
- Puspita, D., & Hamidi, U. S. (2021). DESENTRALISASI FISKAL Dua Dekade Implementasi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–289.
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., & Rahayu, W. T. (2021). *DUA DEKADE IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA* (U. S. Hamidi & D. Puspita (eds.)). Badan Kebijakan Fiskal.
- Rahmah, A., & Zein, B. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 213–220.
- Rarung, P. (2016). Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Pdrb Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 449–460.
- Ridwan, D., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.24036/jkep.v4i1.13358>
- Salsabillah, A. (2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Pada Alokasi Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016). *Jurnal Ilmiah*, 10(2), 1–94.
- Samudra, G., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Kemandirian, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–20.
- Sukarta, A. W., & Damiri. (2021). *Korupsi pembayaran pajak air tanah PT Great Giant Pineapple (GGP)*. Antarnews.
- Suranto. (2023). PENGARUH DANA PERIMBANGAN (DBH, DAU, & DAK) TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) SULAWESI SELATAN. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan*, 3(01), 53–67.
- Tiebout, C. . (1956). A Pure Theory Of Local Expenditures. *The Journal of Political Economy*, 14(5), 416–424.
- Wildan, M. (2021). *Terseret Kasus Pengemplangan Pajak, Pejabat Daerah Ditahan Kejati*. DDTC News.
- Wulantari, R., & Haviz, M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat 2003-2017. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i1.62>